

VIETNAM DAN INDONESIA DI AWAL PANDEMI COVID-19

(Ditinjau dari Sistem Politik-Pemerintahan)

Rizky Octa Putri Charin¹, Fadli Afriandi²

^{1,2}Departemen Politik & Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

Jl. Sosio Yusticia Bulaksumur, Yogyakarta

kikycharin@gmail.com¹, fadliafriandii@gmail.com²

ABSTRACT

This paper is a comparative study between Vietnam and Indonesia in handling COVID-19. The comparison between the two countries is viewed from the political approach of the government. The aim is to find out how to handle the crisis in two countries that have different political and governmental systems. The main finding of this study is that countries with communist (centralized) forms of government have better command and coordination, compared to democratic (decentralized) countries when facing a crisis, in this case study COVID-19. This paper is a qualitative research with data collection techniques is literature study. There are differences in responses that have an impact on handling in Indonesia and Vietnam. This difference in handling is related to the centralized system of communism or one command that makes clear and firm instructions in dealing with COVID-19 so that victims can be minimized. In contrast to Vietnam, Indonesia as a decentralized democracy has a slow pace and different policies between the center and the regions. This condition causes confusion in coordination so that people experience misinformation in their understanding of COVID-19, which then has an impact on increasing the number of positive cases of COVID-19.

Keyword: COVID-19, centralistic, decentralized, Indonesia, Vietnamese

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan respon awal antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Vietnam dalam menghadapi pandemi *novel coronavirus disease-2019* atau COVID-19 yang ditinjau dari pendekatan sistem politik pemerintahan. Indonesia menjadi salah satu dari sekian banyak negara di dunia yang masih berada pada gelombang pertama COVID-19 (Utomo, 2020). Kondisi ini berbanding terbalik dengan Vietnam yang mampu melewati krisis pada

gelombang kedua COVID-19. Vietnam dikategorikan berhasil mengatasi penyebaran COVID-19 di negaranya karena Vietnam mampu mencatat nol kematian akibat COVID-19 pada awal mula penyebaran virus (Rizal, 2020). Keberhasilan Vietnam dalam menghadapi pandemi yang menyerang hampir seluruh belahan dunia tersebut menjadi alasan utama mengapa penelitian ini mengkomparasi atau membandingkan respon antara pemerintah Indonesia dan Vietnam.

Tanggal 31 Desember 2019, WHO (*World Health Organization*) melaporkan kasus pertama COVID-19 muncul di Wuhan, China. Awal mula kemunculannya, COVID-19 merupakan kasus lokal yang berkembang menyebar ke seluruh dunia dengan cara penularan atau dikenal dengan kasus impor yang berasal dari luar wilayah atau transmisi lokal antar penduduk (TaiwanToday, 2020). Tercatat pada tanggal 13 Januari 2020, Thailand dilaporkan menjadi negara pertama dengan kemunculan kasus COVID-19 di luar negara China, sehingga karenanya WHO melansir pada 11 Maret 2020, bahwa COVID-19 tergolong ke dalam pandemi global. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah korban sejumlah 13 kali lipat pada 114 negara, serta telah menyebabkan kematian kurang lebih 4.291 jiwa. Kondisi ini tentunya membuat seluruh dunia dihadapkan dengan sebuah ancaman yang akan memberikan dampak yang merugikan dalam berbagai sektor, bahkan mengharuskan tiap negara menerapkan protokol kesehatan yang bertujuan dalam mengurangi penyebaran virus demi menciptakan ketahanan negara dan perlindungan bagi warga negaranya. Menurut data dari Worldometer, bahkan sampai dengan Januari 2021 kasus

positif COVID-19 mencapai 100 juta di dunia, dengan 3 negara terbesar yang terkena COVID-19 yaitu, Amerika Serikat, India dan Brasil (Worldometers, 2020).

Untuk Indonesia, data menunjukkan bahwa pada pertengahan Januari 2021 terdapat 1 juta orang yang terinfeksi COVID-19, laporan harian menunjukkan tren kenaikan data positif terinfeksi pandemi COVID-19 cenderung signifikan dan belum ada tanda-tanda penurunan angka terinfeksi (Worldometers, 2020). Forbes telah melansir laporan yang diterbitkan oleh *Deep Knowledge Group*, pada 13 April 2020, laporan tersebut melampirkan daftar negara yang memiliki resiko kegagalan paling tinggi dalam menangani pandemi, Indonesia termasuk salah satu negara yang berada dalam kategori tersebut (Forbes, 2020). Situasi ini diperburuk oleh persepsi bahwa sistem, fasilitas, dan sistem jaminan kesehatan Indonesia masih jauh dari standar universal perawatan kesehatan global. Laporan Global Forbes yang didukung oleh berbagai laporan tentang penanganan pandemi yang ditandai dengan banyaknya kelemahan di berbagai sektor serta masalah tata kelola, dapat menggambarkan situasi riil di Indonesia (Mas'udi & Winanti, 2020).

Berbanding terbalik dengan penilaian terhadap Indonesia, Vietnam justru sangat diapresiasi oleh dunia internasional atas keberhasilannya mengatasi pandemi COVID-19 yang berbatasan langsung secara darat dengan China. Mempertimbangkan kedekatan geografis, yaitu seluas 1.400km berbatasan langsung secara darat dengan China di bagian utara negaranya, membuat Vietnam beresiko tinggi mendapatkan transmisi virus, didukung oleh fakta bahwa jumlah penduduk Vietnam tergolong padat, yaitu kurang lebih 96 juta jiwa (Huynh, 2020). Kedekatan wilayah ini merupakan salah satu alasan mengapa respon berlebihan dilakukan pemerintah Vietnam dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pada awalnya, Vietnam menunjukkan berbagai respon yang dianggap berlebihan oleh dunia internasional, seperti larangan perjalanan ke luar negeri, mengumumkan retorika perang terhadap virus, hingga keputusan *lockdown*, namun respon berlebihan tersebut terbukti sangat efektif, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya satu pun kematian akibat virus corona di Vietnam pada awal mula virus menyebar di dalam negeri Vietnam (Januari 2020) hingga kematian pertama tercatat pada 31 Juli 2020. Dalam lebih dari dua bulan sejak

23 Januari ketika kasus pertama COVID-19 terdeteksi di Vietnam, ada 239 kasus yang dikonfirmasi dengan nol kematian (La et al., 2020). Dilaporkan pada 14 Mei 2020, 260 orang tercatat telah sembuh dari jumlah keseluruhan 288 kasus positif COVID-19 di Vietnam. Pencapaian ini sangat fantastis jika dibandingkan dengan kasus di Malaysia yang mencatat angka kurang lebih 6000-an kasus positif, kemudian angka tinggi tertular virus juga dialami oleh Singapura yaitu sebanyak 26.098 orang dengan perbandingan jumlah warga negaranya 5,6 juta jiwa. Menunjukkan bahwa Vietnam telah berhasil dalam mengekang penyebaran wabah virus corona dibanding banyak negara kaya dan lebih maju (Iswara, 2020).

Ditinjau dari segi empiris, penelitian terkait COVID-19 di Indonesia terhitung masih sangat sedikit. Oleh karena itu, tujuan dari studi ini adalah untuk mengisi kesenjangan tersebut. Dalam kajian ilmu sosial politik, topik penelitian virus corona dipaparkan sekelompok ilmuwan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam buku yang telah terbit pada tahun 2020 berjudul "*Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal*". Studi tersebut membahas empat isu menarik, yaitu (i) ketidakpastian negara

dan lembaga internasional dalam menghadapi COVID-19, (ii) upaya dan ketahanan sektoral, (iii) kelompok marjinal dan modal sosial pada masa COVID-19, dan (iv) pengetahuan dan komunikasi publik COVID-19 (Mas'udi&Winanti, 2020). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kajian dan artikel ilmiah mengenai COVID-19 masih sangat terbatas jumlahnya, mengingat pandemi ini terjadi pada waktu yang belum lama. Uraianannya juga lebih berfokus pada konteks kesehatan, seperti yang disajikan oleh (Susilo et al., 2020). Dalam konteks ilmu sosial politik, hanya terbatas pada beberapa kajian, contohnya kecakapan pemerintah daerah (Juaningsih et al., 2020) mengenai kebijakan pangan (Hirawan et al., 2020) dan penundaan pemilihan kepala daerah akibat COVID-19.

Perbedaan tulisan ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada misi yang ingin diterangkan, yaitu adalah upaya untuk membandingkan respon antara dua negara, yakni Indonesia dan Vietnam ketika dilanda pandemi yang merupakan kondisi krisis yang mencakup hampir seluruh negara-negara di dunia. Selain membandingkan respon kedua negara, lebih lanjut penulis ingin menganalisa upaya apa sajakah yang telah dilakukan Vietnam, dengan

harapan agar ke depannya jika hal-hal semacam ini melanda kembali, tentu Indonesia sudah lebih siap dengan segala upaya preventifnya karena belajar dari keberhasilan negara lain dalam menangani kondisi krisis.

Tulisan ini menganalisis perbandingan respon kedua negara berdasarkan pada bentuk distribusi pemerintahannya. Secara teoritis, tulisan ini dianggap menarik karena adanya perbedaan mencolok antara Indonesia dengan pemerintahan berasaskan pada demokrasi, sedangkan Vietnam dengan bentuk pemerintahan negaranya adalah komunisme. Terminologi komunisme yang dimaksud pada tulisan ini adalah seperti apa yang dijelaskan oleh (Suseno, 1986), merupakan sebuah pemerintahan negara dengan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut: Pertama, Ideologi Marxisme–Leninisme yang bercirikan materialisme, ateis, dan kolektivis. Kedua, hanya memiliki satu partai yang berkuasa. Ketiga, etatisme ekonomi.

Tabel 1. Perbandingan Indonesia dan Vietnam

Aspek	Indonesia	Vietnam
Bentuk negara	Republik	Republik-Sosialis
Pemerintahan	Desentralisasi	Sentralisasi
Ideologi Negara	Demokrasi Pancasila	Komunis
Sistem Kepartaian	<i>Multi-party</i>	<i>Single-party</i>

Pembagian sistem kekuasaan	Terpisah antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif	Terpusat pada satu kekuasaan
----------------------------	--	------------------------------

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Prinsip yang sangat khas dalam pelaksanaannya adalah seluruh aspek atau bidang kegiatan warga negara diatur dan diawasi oleh negara. Sistem ini dimaksud juga dengan sistem totaliter. Kemudian, hanya satu partai yang berkuasa dalam pelaksanaan pemerintahan, yaitu Partai Komunis (Asnawi&Hartutik, 2014). Keunikan dari sistem diktator satu partai adalah semua aktor pemerintahan formal: eksekutif, administratif, legislatif dan yudikatif, bertindak sebagai alat demi mencapai tujuan pemerintahan yang sebelumnya dirumuskan terlebih dahulu oleh penguasa Partai Komunis. Sentralisasi struktur eksekutif dan administratif diperkuat oleh pengaruh besar dari Partai Komunis yang terorganisir dengan baik. Perwakilannya merupakan bagian dari Partai Komunis, tugas mereka adalah mengontrol pelaksanaan urusan kenegaraan, dan membuat berbagai pernyataan politik. Undang-undang dan pengadilan hanya berjalan sebatas untuk menegakkan standar perilaku yang ditetapkan oleh pemimpin partai (Asnawi&Hartutik, 2014).

Berbeda dengan Vietnam yang sentralistis, Indonesia menganut sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi ini merupakan salah satu cara untuk memperkuat demokratisasi di Indonesia. Desentralisasi menjadi cara yang baik untuk meningkatkan partisipasi dan mendekatkan diri kepada masyarakat. Besarnya peluang partisipasi tersebut membuat masyarakat semakin dekat dengan proses-proses politik termasuk sebagai perumus kebijakan (Rahmatunnisa, 1999). Salah satu bentuk desentralisasi adalah desentralisasi teritorial yaitu penyerahan kekuasaan dan kewenangan kepada pemerintahan yang lebih rendah (Rahmatunnisa, 1999). Desentralisasi teritorial ini setidaknya ada tiga bentuk pengertian, pertama terkait tinggi rendahnya kewenangan dan kekuasaan, kedua mengenai independensi dalam menjalankan kewenangan dan kekuasaan, dan ketiga adalah jenis kewenangan yang dijalankan oleh pemerintah daerah tersebut (Rahmatunnisa, 1999).

Konsekuensi dari sistem desentralisasi Indonesia adalah pemisahan kekuasaan antara pusat dan daerah yang sebelumnya telah ditetapkan pada UU No. 32 tahun 2004 kemudian diganti menjadi UU No. 23 tahun 2014.

Aturan ini menyatakan bahwa urusan kenegaraan dibagi menjadi tiga bidang: Pertama *umum*, yang berarti adalah kewenangan berada di tangan presiden. Selanjutnya *absolut*, yaitu urusan pemerintahan pusat seperti pertahanan dan keamanan, agama, peradilan, politik luar negeri, moneter dan fiskal. Yang terakhir *konkuren*, dibagi ke dalam urusan pemerintah pusat dan daerah. Di dalam urusan pemerintah konkuren terbagi menjadi wajib dan pilihan (JDIHBPK, 2014). Salah satu urusan wajib adalah terkait masalah kesehatan yang artinya seluruh pemerintah daerah wajib menyelenggarakannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *institutionalism*. Pendekatan ini membahas mengenai struktur system negara. Pengumpulan data pada menggunakan teknik menghubungkan teori dengan data-data yang didapat melalui riset kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data bersumber dari buku-buku, artikel-artikel dalam jurnal ilmiah, mencari informasi yang relevan dari internet, data dari situs-situs resmi negara dan organisasi internasional, ataupun media cetak maupun elektronik.

Batasan penelitian ini adalah sejak awal munculnya COVID-19, yaitu pada akhir tahun 2019 hingga wacana vaksinasi COVID-19 di Indonesia yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada bulan Juli-Agustus 2020. Karena penulis menilai bahwa masa tersebut merupakan periode paling krusial dalam menentukan sikap untuk menangani krisis, dampaknya di masa tersebut masyarakat kehilangan kepercayaan pada kinerja pemerintah dalam mengurangi penyebaran COVID-19, kemudian setelah periode tersebut, masyarakat memiliki harapan baru terhadap efektivitas pemberian vaksin demi mencegah penyebaran virus lebih lanjut.

PEMBAHASAN

Respon Vietnam dan Indonesia terhadap COVID-19

Salah satu faktor utama keberhasilan Vietnam mengatasi pandemi COVID-19 adalah karena urusan pemerintahan dan struktur ketatanegaraan Vietnam yang diatur oleh komando tunggal (Arbar, 2020). Konsekuensinya adalah seluruh keputusan dikeluarkan langsung dari pemerintah pusat akan sesegera mungkin tersampaikan ke tingkat daerah hingga semua warga negara berkewajiban untuk

mematuhinya. Diakui memang sebagian besar negara di dunia mengalami kondisi kegamangan. Penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia, pada tahap awal mengindikasikan tidak adanya keseriusan dari Pemerintah Pusat, berimbas pada absennya sistem antisipasi yang mumpuni sebelum wabah menyebar lebih masif. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan respon pengabaian para *stakeholder* mengenai bahaya virus, diperburuk dengan absennya komando secara nasional demi mengendalikan situasi pandemi. Terlebih lagi kondisi ini semakin mengesankan karena berbagai *statement* para *stakeholder* di media nasional yang tidak ilmiah dan justru cenderung lebih meremehkan. Absennya sistem antisipasi, pengabaian resiko sebagai respon awal, tentu berimbas atas krisis pengendalian yang tercermin pada; lemahnya koordinasi antara pusat-daerah, tumpang-tindih kebijakan, ketidakjelasan fakta, dan adanya indikasi ketidak-yakinan publik terhadap kemampuan negara mengelola krisis (Mas'udi&Winanti, 2020).

Dalam hal komunikasi publik, sejak Januari 2020 justru pemerintah Vietnam telah sangat gencar dengan mengirimkan pesan SMS ke seluruh lapisan masyarakat yang berisi informasi

mengenai “mengapa” dan “apa” yang harus dilakukan demi melindungi diri sendiri khususnya. Upaya cepat tanggap pemerintah ini juga didukung dengan kepatuhan masyarakat. Karena sifatnya yang sentralistis, maka keputusannya bisa langsung dilaksanakan secara serentak dari pusat hingga ke daerah. Sehingga, mau tidak mau harus mengikuti aturan (AlQodariah, 2020). Jika dibandingkan, pola komunikasi antara pemerintah Vietnam tentu sangat berbeda dengan yang dicontohkan oleh pemerintah Indonesia dengan berbagai ketidaksiapannya pada awal mula virus corona menyebar di dalam negeri Indonesia.

Lebih lanjut, bagian pembahasan ini akan menganalisa secara terperinci bagaimana perbandingan respon awal antara Vietnam dan Indonesia dalam mengelola berbagai dampak dari penyebaran virus corona ke depannya di dalam negeri masing-masing.

Respon Pemerintah Vietnam

Over-Reacted: Nationwide

Distancing/Lockdown

Awal Januari 2020 tercatat masih tidak ada kasus positif COVID-19 di Vietnam, hanya saja di Wuhan pada saat itu telah dilaporkan sebanyak dua orang meninggal. Kemudian pasien positif

nomor satu ditemukan di Vietnam akhir Januari 2020, pemerintah Vietnam dengan cepat membatalkan seluruh penerbangan dari Wuhan ke Vietnam sebagai langkah awal pencegahan masuknya gelombang virus yang lebih besar (Huynh, 2020). Vietnam juga memiliki tingkat kesadaran tinggi, dengan menyadari bahwa sistem medisnya tidak akan mampu menangani pasien jika wabah menyebar dengan cepat. Sehingga saat kasus pertama yang dipastikan pada 23 Januari 2020 menginfeksi pria yang baru saja tiba dari Wuhan, negara itu juga langsung menerapkan karantina dalam skala besar bagi pendatang. Kemudian tindakan berlebihan itu juga termasuk menerapkan penguncian (*lockdown*) bersifat nasional atau yang dikenal dengan *nationwide distancing* pada awal April 2020, bahkan di saat kasus yang dikonfirmasi masih sangat sedikit (Garda World, 2020).

Pada awal kasus COVID-19 merebak, Vietnam mengantisipasi warga negaranya untuk berhati-hati dan bersiap menghadapi skenario terburuk dari penyebaran virus tersebut. Vietnam mengambil tindakan yang lebih cepat dari yang disarankan WHO. Langkah penutupan penerbangan dari Wuhan dan penggunaan wajib masker sudah

diberlakukan oleh pemerintah Vietnam bahkan sebelum WHO mengeluarkan rekomendasi. Vietnam juga dengan cepat melakukan tes massal dan penelusuran kontak terhadap orang-orang yang dicurigai positif dan juga yang sebelumnya diketahui telah berinteraksi dengan pasien terinfeksi COVID-19. Setiap kasus bisa di-*tracing* di mana saja, keberadaan orangnya, kemudian seluruh area umum yang pernah disinggahnya sebelum terpapar virus ditutup selama 14 hari. Dalam hal melacak orang yang berkontak langsung, Vietnam mengambil upaya yang lebih ekstrem, Vietnam melacak hingga orang keempat, sedang negara maju dalam hal ekonomi dan teknologi seperti contohnya Jerman hanya melacak orang yang berinteraksi langsung dengan pasien positif saja (Rezgisari, 2020).

Menurut data IMF, hingga 20 Mei 2020, Vietnam sudah melakukan 275.000 tes di seluruh wilayah Vietnam lalu sekitar 7.000 orang dikarantina, baik di pusat kesehatan ataupun isolasi mandiri. Karantina secara ketat dilakukan oleh Vietnam sejak 12 Februari 2020, padahal saat itu jumlah kasus hanya tercatat sebanyak 10 kasus (CNN, 2020). Vietnam juga memanfaatkan teknologi untuk memberikan informasi yang aktual

kepada masyarakat. Pemerintah melalui sebuah aplikasi di ponsel menyediakan data mengenai kasus positif dan potensi paparan di kota-kota besar, yang diunduh sekitar 60% penduduk Vietnam. Setelah melakukan *lockdown* dan kebijakan pengetatan, Vietnam akhirnya berhasil mencapai titik kasus 0 per hari, sehingga pada 23 April 2020 pemerintah mengakhiri masa *lockdown* dan mulai melonggarkan kebijakan *social distancing* (Detik.com, 2020). Karena keberhasilannya ini, akhirnya Vietnam mulai kembali memperbolehkan perjalanan domestik, aktivitas ekonomi, serta kegiatan belajar di sekolah dan universitas. Kebijakan karantina yang dipantau secara ketat, penelusuran lengkap riwayat kontak langsung dengan pasien COVID-19, terbukti merupakan upaya yang paling tepat (Wirawan, 2020). Kebijakan yang sejak awal dinilai dunia sebagai tindakan yang berlebihan ini ternyata terbukti efektif menekan angka penyebaran virus di dalam negeri Vietnam.

Sentralistis Menghasilkan Ketegasan Komando

Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc telah menyampaikan slogan bahwa memerangi epidemi corona, berarti memerangi musuh, bahkan sebelum pandemi COVID-19

menyebar di Vietnam. Terbukti ungkapan ini membawa dampak kepatuhan masyarakat di berbagai lapisan. Pemerintah otoriter Vietnam terbiasa menuntut kepatuhan dari warga negaranya, hal ini ditegaskan oleh akademisi dari *Harvard's Partnership for Health Advancement* di Vietnam, Hanoi, Todd Pollack bahwa masyarakat sebagian besar bersatu di belakang pemerintah karena mereka sangat percaya pada pemerintah dengan melihat segala upaya yang dilakukan pemerintah demi melindungi populasi (Wirawan, 2020). Karena berada dalam satu komando, pemerintah terbuka dalam komunikasi publik, sehingga menimbulkan kepercayaan dari warga negaranya bahwa pemerintah sedang berupaya giat demi mengurangi penyebaran virus.

Sistem pemerintahan Vietnam yang sangat sentralistis membuat Pemerintah Pusat bisa sesegera mungkin mengambil keputusan. Duta besar RI di Vietnam Ibnu Hadi menyatakan bahwa hal inilah yang membuat kebijakan melawan pandemi COVID-19 dapat dengan cepat diterapkan tanpa adanya. Selain konfigurasi politik bersifat sentralis yang hanya dikoordinir oleh satu partai yaitu Partai Komunis, militer Vietnam juga turut ambil peran dalam

hal mendukung pemerintah Vietnam yang tengah berada dalam kondisi penanganan krisis ini. Partai Komunis dan juga militer mempunyai struktur hingga tingkat distrik atau paling bawah, serta mampu mengeluarkan keputusan dan kemudian mengimplementasikannya dengan cepat. Masyarakat menjadi patuh bukan hanya dikarenakan bahaya tertular virus, tetapi juga tidak berani melawan perintah aparat militer. Maka dari itu weforum.org menyebut upaya-upaya yang diterapkan Vietnam memang efektif, namun mungkin tidak efektif jika diterapkan di negara demokrasi (Putri, 2020). Peran penting angkatan militer adalah membantu melakukan *tracing* pada pasien positif COVID-19 dan menggalakkan kebijakan karantina dengan ketat. Tidak hanya aparat militer, namun turut serta juga petugas keamanan serta intelijen dari Partai Komunis yang ikut bertugas memantau. Kegiatan para aktor tersebut setiap hari yang berlalu-lalang di lingkungan perumahan penduduk menjadi pemandangan yang sangat lumrah. Demi diterapkannya kebijakan tersebut, Vietnam juga mengancam denda bagi siapapun yang didapati menyebarkan berita palsu maupun mis-informasi terkait COVID-19. Terbukti dengan adanya 800 orang yang telah diberi

sanksi. *Vietnam News Agency* (VNA) melaporkan bahwa siapa saja yang tidak mematuhi aturan pencegahan COVID-19, maka konsekuensinya harus menghadapi kompensasi berat, bahkan hukuman penjara. Untuk masyarakat yang tidak menggunakan masker, maka akan membayar kompensasi senilai 300.000 dong atau sama dengan Rp 200.000. Sedangkan untuk warga yang kedapatan tidak mematuhi aturan karantina, didenda uang sebanyak 10 juta Dong yang senilai dengan Rp 7.000.000, tidak hanya itu saja tetapi juga menghadapi proses pengadilan. Fasilitas umum seperti restoran serta hotel yang melanggar perintah untuk menutup usahanya tersebut juga dikenai kompensasi sejumlah 20 juta dong atau senilai dengan Rp 14.000.000 (Detik.com, 2020).

Bentuk ketegasan lainnya yang cenderung ekstrem adalah Vietnam mengumumkan perang menentang virus corona demi menunjukkan bahwa kondisi yang dihadapi Vietnam saat ini adalah kondisi darurat. PM Vietnam menyatakan seluruh bentuk usaha, semua masyarakat, dan juga semua lokasi pemukiman penduduk tanpa terkecuali, bersama menjadi tameng pertahanan untuk mencegah penyebaran virus. Pernyataan bahwa corona adalah

musuh bersama itu ternyata terbukti mengenai sasaran, sehingga masyarakat Vietnam merasa bangga pada upaya mereka bersama-sama dalam berjuang melawan kesulitan pada masa krisis. Didukung oleh media yang dikendalikan penuh oleh pemerintah yang menyampaikan kampanye secara masif memerangi COVID-19 di Vietnam (Detik.com, 2020)

Jika ditilik lebih dalam, pendekatan sentralisasi atau *top-down* pemerintah Vietnam untuk kepemimpinan, mencapai hingga ke tingkat masyarakat pada lapisan terbawah sebenarnya memang membawa masalah tersendiri. Disampaikan oleh Phil Robertson dari *Human Rights Watch* (2020), efektifnya *physical distancing* dan karantina juga dipengaruhi oleh sistem kader Partai Komunis yang setia memata-matai warga di daerah dan melapor kepada atasan. Tentu hal ini menimbulkan adanya pelanggaran hak-hak dan privasi warga sipil. Namun, ternyata tidak banyak orang yang mempermasalahkan hal itu, karena kontrol penuh pemerintah atas media (Wirawan, 2020). Vietnam tidak sama dengan Jerman ataupun Selandia Baru yang tergolong dalam kategori negara maju, kedua negara ini mampu menerapkan sistem pelacakan

kesehatan menggunakan kecanggihan teknologi. Sedangkan sistem pelacakan di Vietnam memanfaatkan *human control* dalam hal *monitoring* publik dengan ketat dan menyeluruh. Pelacakan ditugaskan kepada aparat militer dan kader partai sebagai mata-mata, membuat pengawasan ketat ini efektif menekan jumlah warga yang tidak mematuhi aturan. Ketika berhadapan dengan kondisi krisis, komando yang bersifat satu-satunya serta terkoordinasi dengan baik menjadi sebuah kewajiban untuk diterapkan. Seperti yang disampaikan oleh Mas'udi dan Astrina (Mas'udi&Winanti, 2020), prinsip yang mendasari kebijakan ini adalah nilai-nilai kemanusiaan yang disertai dengan mobilisasi semua sumber daya yang ada.

Vietnam menyadari banyaknya kerugian yang mereka alami dari segi ekonomi ketika menerapkan *lockdown* selama 3 minggu, sebab itu demi mengurangi beban penduduknya di sector ekonomi, Vietnam menggelontorkan bantuan sejumlah 1,1 miliar dolar AS (DW, 2020). Pemerintah juga mengumumkan sumbangan sukarela dari masyarakat. Masyarakat dapat memberikan bantuan semampunya, disebabkan mereka yakin atas kerja keras pemerintah dalam melawan COVID-19 (Purnamasari,

2020). Kerugian pada sektor ekonomi dan masalah sosial serta medis lainnya diabaikan oleh misi “memikirkan virus saja”. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan di Vietnam ini tidak akan efektif jika diterapkan di negara-negara yang sekarang menderita infeksi meluas, tetapi untuk beberapa negara yang belum terkena, Vietnam bisa jadi percontohan yang baik. Kesadaran diri Vietnam atas keterbatasan fasilitas kesehatan dan teknologi yang mereka miliki membuat mereka bergerak lebih cepat dan responsif dalam menghadapi krisis.

Respon Pemerintah Indonesia Perbedaan Respon Pemerintah Pusat dan Daerah

Respon awal mengacuhkan ancaman COVID-19 ternyata berakibat fatal terhadap keterlambatan dalam penanganan dan penyebarannya. Hasil survey *Center for Social Political Economic and Law* (CESPELS), dari total 10.000 orang partisipan, 45 persen responden menganggap pemerintah lamban menangani penyebaran virus corona di Indonesia. 29,6 persen menilai biasa saja dan 25,4 persen lagi menyatakan pemerintah telah cepat mengatasi pandemi. Tidak hanya berdasarkan persepsi publik dalam negeri, berbagai laporan global dan liputan media juga sejalan dengan hasil

survei yang mengindikasikan Indonesia lamban merespon penyebaran virus corona. Pernyataan ini dibuktikan berdasarkan total keseluruhan positif COVID-19 di Indonesia yang menduduki posisi terbanyak kedua pada kawasan Asia (Purnamasari, 2020).

Jika kita kembali melihat pada masa awal pandemi yang diketahui muncul pertama kali di Wuhan, Presiden ataupun pejabat negara berwenang lainnya tidak memberikan pernyataan apa pun kepada publik terkait hal ini. Namun, justru pemimpin di daerah yang lebih tangkas menangani perkembangan virus tersebut (Aulia, 2020). Pernyataan ini dapat dibuktikan pada salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Selatan, yang besegera bergerak dalam dengan menyusun tim khusus demi menghindari penyebaran virus, bahkan sejak awal mula munculnya virus corona di Wuhan (Sumeks, 2020). Terhitung sejak 30 Januari 2020, Pemerintah Kabupaten Muara Enim sudah membentuk tim khusus yang beranggotakan Dinas Kesehatan dan Organisasi Perangkat Daerah, yang dilakukan adalah memonitori warga negara asing yang datang ke Kabupaten Muara Enim, kemudian yang tidak kalah penting juga, mereka membuat laporan pendataan

kesehatan warga pada setiap bulan untuk diserahkan pada Gubernur (Pemerintah Muara Enim, 2020) lainnya adalah pada 29 Januari 2020, Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta telah mengadakan rapat bersama Imigrasi dan Badan Intelijen Negara (BIN) demi mendiskusikan berbagai ancaman yang mungkin akan terjadi ke depannya serta untuk memonitori perkembangan kasus COVID-19 (CNBC Indonesia, 2020). Sama dengan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, upaya yang dilakukan Anies Baswedan ini adalah dengan maksud agar pemerintah DKI Jakarta bisa memonitori kehadiran masyarakat Indonesia serta warga asing yang baru tiba dari luar negeri agar dapat segera bersiap-siap untuk skenario terburuk yang berasal dari masyarakat yang tinggal di wilayah DKI Jakarta yang diklasifikasikan sebagai ODP (orang dalam pemantauan) (CNBC Indonesia, 2020). Respon yang ditunjukkan oleh pemerintah di daerah ketika menghadapi kasus COVID-19 menunjukkan adanya kesiagaan dini, sangat berbeda jika dibandingkan dengan Pemerintah Pusat.

Tindakan meremehkan pentingnya penanganan krisis sedini mungkin adalah salah satu ciri suatu negara tidak memiliki daya tanggap terhadap krisis (Mas'udi & Winanti,

2020). Pernyataan ini didukung dengan pemerintah pusat yang hanya sekadar memberikan anjuran kepada publik agar menjaga kesehatan diri dan kebersihan lingkungan. Tentu tidak ada paksaan dalam anjuran ini, bahkan Pemerintah Pusat hanya menganjurkan pengurangan aktivitas di luar rumah tanpa mengeluarkan kebijakan apapun, meski sudah terdeteksi adanya dua orang yang positif terkena COVID-19, data diri orang yang terinfeksi itu juga dirahasiakan (Aulia, 2020). Jika informasi mengancam kehidupan orang banyak dan ketertiban umum, seharusnya Badan publik wajib memberikan keterbukaan mengenai hal ini, begitulah yang tertera di Pasal 10 ayat 1 UU No. 14 Tahun 2018. Kebijakan *social distancing* yang diumumkan pada 2 Maret 2020 yang kemudian diganti menjadi *physical distancing* dinilai oleh sejumlah pihak terlambat dideklarasikan dan diterapkan (Putra, 2020).

Sudah semestinya Pemerintah Pusat mengambil langkah tegas atas kasus positif di awal. Salah satunya adalah keterbukaan informasi tentang masalah ini kepada publik, karena dapat membahayakan kesehatan masyarakat secara umum. Dalam hal transparansi data, Pemerintah Pusat juga terkesan

membatasi informasi untuk masyarakat (Djalante et al., 2020). Achmad Yurianto, selaku juru bicara pemerintah khusus COVID-19 memberikan klaim bahwa data jumlah pasien COVID-19 bersifat rahasia, yang berarti tidak terbuka untuk publik. Di satu sisi, informasi mengenai data pasien terinfeksi sangat penting untuk diberitahu ke masyarakat. Informasi sepenting positif atau tidaknya pasien harus sesegera mungkin diumumkan secara terbuka di hadapan publik. Karena jika pasien tersebut terbukti positif, maka kondisi masyarakat yang berada di sekitarnya tentu juga perlu diperhatikan (Abdi&Apinino, 2020).

Sikap monopoli informasi ini diakui oleh Presiden Jokowi dengan maksud untuk meminimalisir kepanikan masyarakat, namun sikap ini justru menjadi bumerang bagi Pemerintah Pusat, sehingga buruknya yang terjadi adalah adanya kesimpangsiuran informasi antar *stakeholder* yang berada di pusat maupun daerah. Lebih lanjut akan dibahas pada poin selanjutnya mengenai kesimpangsiuran informasi dan juga komando.

Kesimpangsiuran Informasi

Jika membandingkan Vietnam dengan sistem pemerintahan yang berjalan sentralis dan negara yang

menganut desentralisasi seperti Indonesia, perbedaan respon kedua negara ketika menghadapi krisis sangat terlihat signifikan. Vietnam jelas lebih sigap dan komprehensif meski kekurangan fasilitas kesehatan dan teknologi, tidak seperti negara maju lainnya. Sementara Indonesia sangat gamang dan bahkan diberi penilaian buruk oleh dunia internasional. Tidak hanya pada masa pandemi COVID-19, menilik pengalaman masa lalu dalam penanganan wabah flu burung di Vietnam, tata laksana pemerintahan yang terpusat terbukti jauh lebih efektif dibandingkan koordinasi antar aktor negara di Indonesia. Arahan dari pemerintah di pusat akan terimplementasikan dengan efektif apabila pemerintah di daerah merasa yakin bahwa kebijakan tersebut relevan, kemudian yang tidak kalah penting adalah adanya dukungan sosial dan dana di wilayah tersebut. Bentuk fleksibilitas dalam implementasi kebijakan tidak hanya dimaknai sebagai upaya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi juga memberikan keleluasaan wewenang bagi daerah dalam memodifikasi dan improvisasi kebijakan, supaya dapat diimplementasikan sesuai dengan karakteristik dan persoalan di masing-

masing daerah (Aulia, 2020). Prinsip inilah yang tidak diterapkan dengan baik di Indonesia.

Salah satu contoh simpang-siur informasi adalah ketika kasus kematian pasien COVID-19 ke 25. Berdasarkan klarifikasinya, Pemerintah Daerah tidak mengetahui sama sekali bahwa kematian pasien tersebut disebabkan oleh COVID-19. Namun setelah dikonfirmasi lebih lanjut, Menteri Kesehatan menyatakan adalah benar pasien tersebut meninggal akibat terinfeksi virus corona (Abdi&Apinino, 2020). Sama halnya dengan yang terjadi di Banten, telah dikonfirmasi oleh Gubernur Banten mengenai adanya empat orang yang positif COVID-19, tetapi juru bicara Covid-19 bagian pusat tidak mengetahui hal ini (Aulia, 2020).

Terhitung hanya dua minggu sejak Presiden mengumumkan munculnya kasus COVID-19 di Indonesia, penyebaran virus ini menjadi sangat pesat di Indonesia. Dari semula hanya berjumlah 2 orang, pada tanggal 16 Maret 2020, 132 orang menyusul positif COVID-19, sehingga total keseluruhan 134 orang terinfeksi COVID-19 (Taher, 2020). Menghadapi peningkatan kasus dengan jumlah yang cukup signifikan, Pemerintah Daerah kembali terlihat lebih cepat tanggap

dibandingkan dengan Pemerintah Pusat terhadap kondisi ini. Klaim ini didukung oleh peringatan pemerintah di setiap kota, yang berarti wilayah tersebut siap menghadapi bencana seperti Papua, Tegal, Solo, dan pedesaan lainnya. Salah satu contoh kebijakannya adalah *lockdown*.

Meski angka kenaikan kasus melonjak drastis, pemerintah pusat justru hanya menghimbau masyarakat untuk menerapkan “*physical distancing*” dalam interaksi sehari-harinya (Aulia, 2020). Kebijakan yang sifatnya hanya “imbauan” tersebut pada prakteknya juga cenderung diabaikan oleh masyarakat ketika pertama kali dideklarasikan. Berbagai fasilitas umum di pusat penyebaran wabah di DKI Jakarta masih terlihat menjadi tempat berkumpulnya kerumunan orang. Nihilnya aturan yang mampu mengatur dan mengikat terkait *social distancing* ataupun *physical distancing* (Savirani&Prasongko dalam Mas’udi&Winanti, 2020) mengakibatkan tidak ada efek jera bagi pelanggar dengan adanya denda atau bahkan sanksi pidana seperti sudah diterapkan Vietnam.

Respon yang gamang, kesimpangsiuran informasi dan komando, hal-hal tersebut terjadi karena

Pemerintah Pusat berada dalam kondisi dilema, harus menyelamatkan sektor ekonomi terlebih dahulu atau justru menyelamatkan nyawa ratusan ribu warganya. Kebijakan yang dipilih akhirnya adalah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) pada 10 April 2020, diterapkan di Jakarta (CNN, 2020). Kebijakan ini pada awal diterbitkan juga belum bisa dilaksanakan untuk seluruh daerah se-Indonesia. Contohnya Pemerintah Provinsi Riau yang terhalang untuk menerapkan PSBB, disebabkan peningkatan jumlah kepulangan tenaga kerja dari luar negeri, sehingga berakibat pada belum konsistennya data kedatangan orang dari luar negeri (MediaIndonesia, 2020) Wilayah Tangerang juga berada dalam kondisi gamang dan mengaku ingin memantau Jakarta terlebih dahulu, lalu mereka juga masih dalam tahap mengkaji keefektifan sistem PSBB tersebut (Simorangkir, 2020). Maka, berdasarkan pada kondisi yang terjadi di masing-masing daerah tersebut, mengisyaratkan bahwa kebijakan PSBB belum bisa diterapkan dengan masif pada semua daerah. Kondisi tersebut dapat dimaklumi, mempertimbangkan adanya ketentuan cukup rumit yang harus terpenuhi lebih dahulu oleh

pemerintah di daerah sebelum menerapkan PSBB (Aulia, 2020).

Terjadinya aturan dan tata kelola yang “tumpang-tindih” atau berlainan antara sektor pusat dan daerah dikarenakan kurangnya koordinasi yang tegas kedua belah pihak. Fakta yang tidak bisa ditolak Pemerintah Pusat adalah pemerintah di daerah adalah pejabat publik yang secara emosional paling dekat dengan masyarakat di wilayahnya, maka dari itu Pemerintah Daerah sudah pasti jauh lebih memahami kebutuhan, karakter serta budaya masyarakat di dalam wilayah kekuasaannya secara administratif. Tetapi Pemerintah Pusat tidak kunjung juga memberikan instruksi serta pelimpahan otoritas kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan improvisasi kebijakan supaya segera diterapkan sejalan dengan karakter permasalahan di daerah (Aulia, 2020). Sementara itu, Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan inisiatif untuk bertindak terlebih dahulu karena mengacu pada aturan di UU No. 6 Tahun 2018, ketika menghadapi kondisi darurat kesehatan, hanya Pemerintah Pusat yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan suatu kebijakan demi menanggapi kondisi tersebut. Karena terbentur aturan ini, implementasi kebijakan dalam negeri

Indonesia dalam menyikapi adanya COVID-19 terbilang rumit (Aulia, 2020). Sementara yang tengah dialami masyarakat saat ini adalah wabah berupa virus yang tidak kasat mata dan karenanya telah menelan banyak korban jiwa, kondisi ini tentu tidak bisa menunggu waktu yang lebih lama untuk mengatasinya.

KESIMPULAN

Vietnam dan Indonesia di sepanjang tahun 2020 mengalami hal yang sama yaitu masuknya *Coronavirus disease* atau COVID-19. Kehadiran COVID-19 ini di kedua negara tersebut disikapi dengan cara yang berbeda. Perbedaan cara menyikapi COVID-19 ini disebabkan oleh sistem politik pemerintahan masing-masing negara. Vietnam sebagai negara komunis menyikapi virus ini dengan menggunakan sistem sentralisasi atau terpusat kepada satu komando. Sedangkan Indonesia yang menganut demokrasi menerapkan desentralisasi.

Sistem sentralistik yang diterapkan di Vietnam memberikan satu komando utama dari Perdana Menteri. Kebijakan awal Vietnam yang responsif, cepat, dan tegas membuat Vietnam mampu mengendalikan virus ini sejak awal. Kebijakan yang dikeluarkan oleh

pemerintah pusat diterapkan juga oleh pemerintah daerah sehingga kebijakan pada satu negara sama. Berbeda dengan Indonesia yang menganut demokrasi desentralisasi membuat kebijakan yang dikeluarkan Presiden Indonesia berbeda dengan yang dilakukan oleh Pemimpin Daerah. Kelambanan respon pusat berbanding terbalik dengan respon daerah yang lebih cepat seperti melakukan *lockdown* wilayah. Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan *social distancing* ataupun *physical distancing* yang implementasinya di lapangan tidaklah ketat. Tidak hanya adanya perbedaan kebijakan antara pusat dan daerah, setiap daerah di Indonesia mempunyai kebijakan yang berbeda-beda pula. Berbedanya kebijakan dan lambannya pusat menyikapi kehadiran COVID-19 ini membuat Indonesia mengalami peningkatan kasus dan juga korban meninggal.

DAFTAR PUSTAKA

Abdi, A. P. (2020). Memungungi Pemda, Pemerintah Pusat Monopoli Penanganan Corona Baca selengkapnya di artikel "Memungungi Pemda, Pemerintah Pusat Monopoli Penanganan Corona", *Tirto.Id*. <https://tirto.id/eEZm>

AlQodariah, F. (2020). *Belajar Tangani*

- Virus Corona dari Vietnam, Negara yang Nihil Kematian COVID-19.*
<https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-01370041/belajar-tangani-virus-corona-dari-vietnam-negara-yang-nihil-kematian-COVID-19?page=5>
- Arbar, T. F. (2020). *Kisah Sukses Vietnam Menang dari Covid, Ekonomi Kebal Resesi.*
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200926074632-4-189644/kisah-sukses-vietnam-menang-dari-covid-ekonomi-kebal-resesi>
- Asnawi&Hartutik. (2014). *Jurnal Seuneubok Lada, No.1, Vol.2 Juli - Desember 2014 Analisis Historis Terhadap Komunisme Sebagai Suatu Ideologi Politik Asnawi & Hartutik.* 2(1), 1–15.
- Aulia, S. (2020). *Diskursus Penanganan COVID-19 Oleh Pemerintah Pusat Dan Daerah: Efektifkah Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Diterapkan?*
<https://fh.unpad.ac.id/diskursus-penanganan-COVID-19-oleh-pemerintah-pusat-dan-daerah-efektifkah-kebijakan-pembatasan-sosial-berskala-besar-psbb-diterapkan/>
- CNBC Indonesia. (2020). *Terungkap Anies Baswedan Sudah Monitor Corona Sejak Januari.*
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200328151315-4-148159/terungkap-anies-baswedan-sudah-monitor-corona-sejak-januari>
- CNN. (2020). *Resep Vietnam Berhasil Buka Lockdown Tanpa Kasus Meninggal.*
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200425084602-106-497169/resep-vietnam-berhasil-buka-lockdown-tanpa-kasus-meninggal>
- Detik.com. (2020). *Kebijakan Lockdown Dipertanyakan Jokowi Vietnam Beri Bukti Diakses.*
<https://news.detik.com/berita/d-4987775/kebijakan-lockdown-dipertanyakan-jokowi-vietnam-beri-bukti/3>
- Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., Sudjatma, A., & Indrawan, M. (2020). *Since January 2020 Elsevier has created a COVID-19 resource centre with free information in English and Mandarin on the novel coronavirus COVID- 19 . The COVID-19 resource centre is hosted on Elsevier Connect , the company ' s public news and information . January.*
- DW. (2020). *Cara Vietnam Menangkan 'Perang' Lawan Virus Corona.*
<https://www.tempo.co/dw/2221/cara-vietnam-menangkan-perang-lawan-virus-corona>
- Forbes. (2020). *Deep Analysis Of Global Pandemic Data Reveals Important Insights.*
<https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2020/04/13/COVID-19-complexity-demands-sophisticated-analytics-deep-analysis-of-global-pandemic-data-reveals-important-insights/?sh=fc8f2bb2f6e2>
- Garda World. (2020). *Vietnam: Social Distancing Measures to Ease From April 23.*
<https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/335386/vietnam-social-distancing-measures-to-ease-from-april-23-update-25>
- Hirawan, F. B., Ekonomi, D., & Indonesia, C. (2020). *Kebijakan*

- Pangan di Masa Pandemi. April*, 1–7.
- Huynh, T. L. . (2020). *The COVID-19 containment in Vietnam : What are we doing?* 10(1), 10–12. <https://doi.org/10.7189/jogh.10.010338>
- Iswara. (2020). *Cara Vietnam Atasi COVID-19*. <https://www.kompas.com/global/read/2020/05/14/205616070/cara-vietnam-atasi-COVID-19-bisakah-ditiru-indonesia?page=all>
- JDIHBPK. (2014). Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. <https://jdih.bpk.go.id/>
- Juaningsih, I. N., Consuello, Y., Tarmidzi, A., & NurIrfan, D. (2020). Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 terhadap Masyarakat Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(6), 509–518. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15363>
- La, V. P., Pham, T. H., Ho, M. T., Nguyen, M. H., Nguyen, K. L. P., Vuong, T. T., Nguyen, H. K. T., Tran, T., Khuc, Q., Ho, M. T., & Vuong, Q. H. (2020). Policy response, social media and science journalism for the sustainability of the public health system amid the COVID-19 outbreak: The vietnam lessons. *Sustainability (Switzerland)*, 12(7). <https://doi.org/10.3390/su12072931>
- Marshall, C & Rossman, G.B. (1994). *Designing Qualitative Research 2nd Edition*. California: Sage Publication
- Mas'udi&Winanti. (2020). *Tata Kelola Penanganan Covid19 di Indonesia: Kajian Awal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- MediaIndonesia. (2020). *PSBB di Riau Terhambat Arus TKI dari Malaysia*.
- PemerintahMuaraEnim. (2020). *Gerak Cepat, Pemkab Muara Enim Bentuk Tim Khusus Pencegahan 2019-nCoV (Virus Corona)*. http://muaraenimkab.go.id/web/detail_berita/397
- Purnamasari. (2020). Akademisi UI: Laporan Global Menyebut Pemerintah RI Lambat Tangani COVID-19. *Tempo.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/09/15522561/akademisi-ui-laporan-global-menyebut-pemerintah-ri-lambat-tangani-COVID-19?page=all>
- Putra. (2020). *Indef: Penerapan Social Distancing di Indonesia Terlambat*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4214010/indef-penerapan-social-distancing-di-indonesia-terlambat>
- Putri, R. D. (2020). *Bagaimana Vietnam memenangkan perang lawan COVID-19?* <https://tirto.id/bagaimana-vietnam-memenangkan-perang-lawan-COVID-19-fflA>
- Rahmatunnisa, M. (1999). *Desentralisasi dan Demokrasi Partisipatoris*. 36(4), 1–10.
- Rezkisari. (2020). *Cara Korea Selatan dan Vietnam Keluar dari Jeratan COVID-19*. <https://republika.co.id/berita/q9urip328/cara-korea-selatan-dan-vietnam-keluar-dari-jeratan-covid19>
- Rizal, J. G. (2020). *Nol Korban*

- Meninggal, Bagaimana Vietnam Berhasil Menangani. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/15/131208465/nol-korban-meninggal-bagaimana-vietnam-berhasil-menangani-pandemi-corona?page=all>.
- Simorangkir, H. (2020). *Kota Tangerang Masih Kaji Penerapan PSBB*. <https://www.medcom.id/nasional/darah/GNI42ZmN-kota-tangerang-masih-kaji-penerapan-psbb>
- Sumeks. (2020). *Pemda Bentuk Timsus Pencegahan Virus Corona*. <https://sumeks.co/pemda-bentuk-timsus-pencegahan-virus-corona/>
- Suseno, F. (1986). *Kuasa Dan Moral*. Gramedia.
- Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, H., Sinto, R., Singh, G., Nainggolan, L., Nelwan, E. J., Chen, L. K., Widhani, A., Wijaya, E., Wicaksana, B., Maksum, M., Annisa, F., Jasirwan, C. O. M., & Yuniastuti, E. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45. <https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>
- Taher, A. . (2020). *Positif Corona Bertambah 17 Orang, Kasus Jadi 134 per 16 Maret 2020*. <https://tirto.id/positif-corona-bertambah-17-orang-kasus-jadi-134-per-16-maret-2020-eFul>
- TaiwanToday. (2020). *CDC Implements Extra Inspection Measures for Wuhan Flights*. <https://taiwantoday.tw/news.php?unit=2,6,10,15,18&post=168773>
- Utomo, A. P. (2020). *Vietnam Dianggap Berhasil Tangani Gelombang Kedua COVID-19 Apa yang-Bisa Dipelajari?* <https://www.kompas.com/global/read/2020/09/23/161313270/vietnam-dianggap-berhasil-tangani-gelombang-kedua-COVID-19-apa-yang-bisa?page=all>
- Wirawan, M. K. (2020). *Reaksi Berlebihan Vietnam Terhadap Virus Corona yang Membuahkan Hasil*. <https://www.kompas.com/global/read/2020/05/15/223917670/reaksi-berlebihan-vietnam-terhadap-virus-corona-yang-membuahkan-hasil?page=all>
- Worldometers. (2020). *Coronavirus Updates*. <https://www.worldometers.info/>